

**KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMBINAAN BUMD
PD. BPR BAHTERAMAS DI BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Muhammad Ackhwan

NPP. 30.1353

*Asal Pendaftaran Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara
Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor-Publik
Email: ackhwanmuhammad27@gmail.com*

Pembimbing Skripsi: Dr. H. Ali Hanafiah Muhi, MP.

ABSTRACT

Background: BUMD is a Regional Owned Enterprise whose capital is wholly or mostly owned by the region. Regional Owned Enterprises themselves play an important role for regional development in particular and national development in general. For the regions themselves, BUMD has a strategic position towards increasing local revenue (PAD). PD. BPR Bahteramas itself is one of the Regional Owned Enterprises owned by the regional government of Southeast Sulawesi Province with the role of coaching taken over by the Bureau of Economic Administration of the Regional Secretariat of Southeast Sulawesi Province which aims to help and encourage the economic growth of people who are currently unable to operate properly as a result of fraud cases committed in PD. BPR Bahteramas. **Purpose:** This study aims to find out how the performance of the State Civil Apparatus of the Bureau of Economic Administration in developing BUMD PD. BPR Bahteramas, what are the supporting and inhibiting factors in fostering BUMD PD. BPR Bahteramas and find out what efforts were made by the State Civil Apparatus for the Bureau of Economic Administration in overcoming obstacles in fostering BUMD PD. BPR Bahteramas. **Method:** The design of this study uses qualitative research with descriptive methods and an inductive approach. Data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. The data analysis technique used in this study is data reduction, data presentation, and drawing conclusions. **Results/Findings:** The results of the study show that the development of BUMD PD. BPR Bahteramas by the State Civil Apparatus of the Bureau of Economic Administration has not gone well caused by several factors such as the lack of quality human resources so that they are less skilled in analyzing existing problems and the frequent occurrence of shortages of operational budgets, especially in BUMD coaching activities, thus hindering the PD BUMD development process. BPR Bahteramas. **Conclusion:** Development of BUMD PD. BPR Bahteramas by the State Civil Apparatus Bureau of Economic Administration Regional Secretariat of Southeast Sulawesi Province has not gone well, especially in the aspect of Human Resources (HR). The State Civil Apparatus, Bureau of Economic Administration, still lacks understanding of matters related to banking, so it is difficult to analyze the existing problems. Efforts made by the State Civil Apparatus in overcoming obstacles are by rearranging the budget, carrying out a merger or merging of all BPRs into 2 BPRs, increasing the supervisory and coaching functions and increasing the competence of the employees of the Bureau of Economic Administration of the Regional Secretariat of Southeast Sulawesi Province.

Keywords: PD. BPR Bahteramas, BUMD, Development.

ABSTRAK

Latar Belakang : BUMD merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Badan Usaha Milik Daerah sendiri memainkan peranan penting bagi pembangunan daerah khususnya dan nasional pada umumnya. Bagi daerah sendiri BUMD memiliki kedudukan yang strategis terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PD. BPR Bahteramas sendiri adalah salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan peranan pembinaan yang diambil alih oleh Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang bertujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang saat ini belum dapat beroperasi dengan baik akibat kasus *fraud* yang dilakukan di PD. BPR Bahteramas. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja Aparatur Sipil Negara Biro Administrasi Perekonomian dalam pembinaan BUMD PD. BPR Bahteramas, apa faktor pendukung dan penghambat dalam pembinaan BUMD PD. BPR Bahteramas dan mengetahui upaya apa yang dilakukan Aparatur Sipil Negara Biro Administrasi Perekonomian dalam mengatasi hambatan dalam pembinaan BUMD PD. BPR Bahteramas. **Metode:** Desain penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan BUMD PD. BPR Bahteramas oleh Aparatur Sipil Negara Biro Administrasi Perekonomian belum berjalan dengan baik yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya kualitas SDM sehingga kurang terampil dalam menganalisis masalah yang ada serta sering terjadinya kekurangan anggaran operasional terkhusus pada kegiatan pembinaan BUMD sehingga menghambat proses pembinaan BUMD PD. BPR Bahteramas. **Kesimpulan:** Pembinaan BUMD PD. BPR Bahteramas oleh Aparatur Sipil Negara Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara belum berjalan dengan baik terutama pada aspek Sumber Daya Manusia (SDM). Aparatur Sipil Negara Biro Administrasi Perekonomian masih kurang memahami hal hal yang berkaitan dengan perbankan sehingga susah untuk menganalisis masalah yang ada. Upaya yang dilakukan Aparatur Sipil Negara dalam mengatasi hambatan adalah dengan penataan ulang anggaran, melakukan *merger* atau penggabungan seluruh BPR menjadi 2 BPR, meningkatkan fungsi pengawasan dan pembinaan dan meningkatkan kompetensi pegawai Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kata kunci: PD. BPR Bahteramas, BUMD, Pembinaan.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara yang berbentuk kesatuan yang berarti bahwa masyarakat Indonesia hidup secara berdampingan secara bersama-sama dalam sebuah wilayah yang sama dan diatur dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang berpedoman pada ideologi Pancasila untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Indonesia sendiri menerapkan system desentralisasi dalam mengelola pemerintahannya yaitu di mana Pemerintahan Pusat menyerahkan urusan pemerintahannya kepada Daerah Otonom berdasarkan Asas Otonomi. Salah satu upaya pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan daerah dan kepentingan masyarakat yaitu dengan pendirian BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) PD. BPR Bahteramas. PD. BPR Bahteramas sendiri adalah salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian rakyat Sulawesi Tenggara dan pembangunan daerah. Kegiatan kegiatan usaha yang dijalankan PD. BPR Bahteramas sendiri dalam rangka membantu meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas meliputi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan, memberikan kredit dan sekaligus melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha mikro kecil, melakukan kerjasama antar BPR daerah dengan keuangan/lembaga lainnya, menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) deposito berjangka, dan atau tabungan bank lainnya, membantu pemerintah daerah melaksanakan sebagian fungsi pemegang kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan, menjalankan usaha perbankan berdasarkan prinsip prinsip syariah dengan memperhatikan fatwa dewan syarif nasional, dan menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2 Kesenjangan Masalah Yang Diambil

Dalam hal ini yang menjadi perhatian adalah kasus pembukuan palsu dan korupsi yang dilakukan oleh karyawan PD. BPR Bahteramas. Kasus pembukuan palsu dan korupsi ini dapat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat serta dapat mengakibatkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, mengingat jumlah nominal yang dihitung mencapai Rp 1.817.594.023 pada PD. BPR Bahteramas Baubau dan Rp 2.535.650.000 pada PD. BPR Bahteramas Buton. Hal tersebutlah yang harus menjadi perhatian oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara khususnya pada Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara mengingat salah satu tugas dari Biro Administrasi Perekonomian adalah membina BUMD yang ada di daerah. Hal ini menggambarkan kinerja Aparatur Sipil Negara di Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara belum maksimal dalam melakukan pembinaan terhadap BUMD PD. BPR Bahteramas. Dalam hal ini, kinerja dapat diukur dari beberapa indikator seperti produktivitas, kualitas layanan, responsivitas dan responsibilitas (Sadu Wasistiono, 2002:48-49). Sehubungan dengan hal di atas, maka kinerja Aparatur Sipil Negara Biro Administrasi Perekonomian perlu dikaji untuk mencapai tujuan adanya BUMD di daerah. Berdasarkan kondisi tersebut Biro Administrasi Perekonomian terus berupaya melakukan

pembinaan terhadap BUMD PD. BPR Bahteramas namun pada prosesnya masih terdapat beberapa hambatan seperti pada kualitas SDM Biro Administrasi Perkonomian dan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga pelaksanaan pembinaan belum maksimal.

1.2 Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Abbas Bahtiar, Rince Tambunan dan Rahmatia (2020). Penelitian tersebut memiliki Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis kesamaan tersebut terletak pada BUMD sebagai objek penggerak perekonomian masyarakat dan kompetensi terhadap kinerja pegawai dan karyawan. Perbedaan terletak pada titik fokus penelitian yang dilakukan oleh Abbas Bahtiar dkk yang menyoroti tentang pengaruh kepemimpinan situasional terhadap kinerja karyawan pada lingkup PD. BPR Bahteramas, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis yakni berfokus pada kinerja dari ASN dan karyawan yang berada pada lingkup Biro Administrasi Perkonomian dan PD. BPR Bahteramas, selain itu perbedaan juga terdapat pada teori yang digunakan. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nofal Supriaddin (2020). Penelitian tersebut memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu membahas tentang kinerja karyawan yang berada di lingkup PD. BPR Bahteramas. Perbedaan dalam penelitian ini terletak dari teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan fokus pada lembaga yang diangkat dalam hal ini penulis mengangkat bagaimana kinerja ASN yang berada di lingkup Biro Administrasi Perkonomian terhadap kegiatan pembinaan yang dilakukan terhadap BUMD PD. BPR Bahteramas.

1.3 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana fokus penelitian yang dilakukan penulis berbeda dari penelitian sebelumnya selain itu lokasi penelitian yang dilakukan penulis yaitu pada Biro Administrasi Perkonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan pada PD. BPR Bahteramas yang Baubau dan Buton. Selain itu terdapat perbedaan teori yang digunakan dalam kedua penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, dan juga terdapat perbedaan hasil penelitian yang akan dijelaskan pada bab 4. Penulis ingin menjadikan dua penelitian ini sebagai penguat penelitian yang akan dilaksanakan mengenai Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pembinaan BUMD PD. BPR Bahteramas di Biro Administrasi Perkonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Karena penelitian tersebut dapat menjadi cerminan untuk dipelajari lebih lanjut bagaimana Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam pembinaan BUMD PD. BPR Bahteramas di Biro Administrasi Perkonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan untuk mengetahui bagaimana upaya yang akan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai kondisi dan kebutuhan yang diterapkan untuk penelitian yang akan dilakukan.

1.4 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pembinaan BUMD PD. BPR Bahteramas di Biro Administrasi Perkonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara apa faktor pendukung dan penghambat dalam pembinaan

BUMD PD. BPR Bahteramas dan mengetahui upaya apa yang dilakukan Aparatur Sipil Negara Biro Administrasi Perekonomian dalam mengatasi hambatan dalam pembinaan BUMD PD. BPR Bahteramas.

II. METODE

Dalam Silalahi (2006:12) disebutkan pengertian metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari cara yang digunakan untuk menyelidiki masalah yang memerlukan pemecahan. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2017:9) metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif adalah suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data dan fakta dengan mempelajari masalah apa yang terjadi dan melakukan analisis yang tepat untuk memberikan pemahaman guna mengetahui apa yang terjadi, setelah mendapat pemahaman dari obyek yang diteliti, kemudian menarik kesimpulan sesuai dengan kondisi tempat. Penulis dalam hal ini yang berpartisipasi langsung melakukan pencatatan dan analisis terhadap fenomena-fenomena dan dokumen-dokumen yang ditemukan di lapangan kemudian membuat laporan penelitian dengan menggambarkan kondisi aktual yang ada di lapangan secara terstruktur dan terperinci.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Biro Administrasi Perekonomian, Kepala Bagian BLUD dan BUMD, Kepala Sub Bagian BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha, Dewan Pengawas PD. BPR Bahteramas, Direktur Utama PD. BPR Bahteramas, Karyawan Biro Administrasi Perekonomian dan Karyawan PD. BPR Bahteramas.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Teori Sadu Wasistiono (2002:48-49) yang dapat digunakan menjadi indikator dalam menentukan bagaimana kinerja ASN Biro Administrasi Perekonomian dalam pembinaan BUMD PD. BPR Bahteramas dilihat dari 6 Indikator yakni hasil pekerjaan, anggaran, kemampuan bekerja, upaya aparatur, partisipasi dan pelaksanaan program.

3.1 Hasil Pekerjaan

Salah satu indikator kinerja untuk mengetahui hasil kinerja Aparatur Sipil Negara Biro Administrasi Perekonomian yaitu dengan melihat hasil pekerjaan yang dilakukan. Hasil pekerjaan dapat didapatkan dengan melakukan riset terhadap pihak yang merasakan bagaimana kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh pihak ASN Biro Administrasi Perekonomian. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan, kegiatan pembinaan sudah berjalan dengan baik dan sesuai prosedur, hal ini dapat dilihat dari kegiatan monitoring dan pendampingan setiap kegiatan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara Biro Administrasi Perekonomian di setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh PD. BPR Bahteramas. Namun, melihat dari kedua kasus yang terjadi bahwa oknum-oknum yang bersangkutan merupakan orang-orang yang memiliki kuasa dan otoritas terhadap rekening para nasabah serta kurangnya ketegasan dari pihak Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk mengatasi hal ini sendiri Biro Administrasi Perekonomian menyerahkan tindak lanjut proses penanganan kepada OJK dan Kembali melakukan evaluasi secara menyeluruh untuk memastikan jumlah kerugian yang dialami untuk kemudian dilaporkan kepada OJK.

3.2 Anggaran

Anggaran sendiri merupakan komponen penting dalam setiap kegiatan. Menurut Munandar (2007:11) anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan penulis di lapangan menunjukkan bahwa anggaran yang dimiliki oleh Biro Administrasi Perekonomian sudah di anggarkan, hanya saja terkadang masih belum memenuhi karena polemic harga di lapangan yang kadang berubah, kemudian pada tahun kejadian kasus pembukuan palsu tersebut sedang terjadinya wabah *covid-19* sehingga dana yang seharusnya dialokasikan untuk kegiatan pembinaan BUMD PD. BPR Bahteramas harus dialihkan ke kegiatan dalam rangka perbantuan *covid-19*. Untuk mengatasi masalah ini sendiri yaitu penganggaran ulang pada tahun anggaran baru dan pembuatan TOR atau kerangka acuan kegiatan BUMD dan BLUD dengan total anggaran mencapai Rp. 129.930.000.

3.3 Kemampuan Bekerja

Proses pembinaan sangatlah penting karena menyangkut dengan percepatan pembangunan ekonomi masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan langsung di lapangan, pembinaan yang dilakukan oleh ASN Biro Administrasi Perekonomian belum maksimal. Hal ini terkait dengan kemampuan bekerja para pegawai yang berada di Biro Administrasi Perekonomian. Masih banyak Aparatur Sipil Negara di Biro Administrasi Perekonomian yang belum memiliki pemahaman yang mendalam mengenai perbankan dan BUMD, dari kurangnya pemahaman ini menyebabkan kurangnya kemampuan pegawai dalam menganalisis masalah yang kerap ditemui. Selain itu, masih banyak pegawai yang kurang menguasai *excel* sehingga masih sering terhambat dalam pengelolaan data terkhusus data data yang berkaitan dengan keuangan yang dikelola. Upaya Biro Administrasi Perekonomian sendiri dalam menyikapi hal ini yaitu mengadakan studi banding ke daerah daerah yang dianggap mempunyai kualitas daerah yang lebih unggul. Selain itu, ada pelaksanaan rapat penyusunan *roadmap* pengelolaan BUMD yang diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri yang melibatkan seluruh pejabat berwenang yang mengelola BUMD se Indonesia, pelaksanaan kegiatan Munas yang diadakan oleh Perbarindo dengan tujuan untuk penguatan BPR-BPRS sebagai Mitra UMKM dalam pemulihan dan kebangkitan ekonomi nasional.

3.4 Upaya Aparatur

Pasca kejadian korupsi dan pembukuan palsu tersebut Biro Administrasi Perekonomian meningkatkan pengawasan yang dilakukan terhadap PD. BPR Bahteramas. Hal ini dilakukan untuk menstabilkan kembali PD. BPR Bahteramas yang pada saat kejadian PD. BPR Bahteramas masuk kedalam pengawasan ketat oleh OJK, peningkatan pengawasan ini juga untuk memastikan PD. BPR Bahteramas menjadi bank yang sehat serta untuk meningkatkan Kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sebelum terjadinya

tindak pidana korupsi dan pembukuan palsu, Biro Administrasi Perekonomian secara rutin melakukan pemantauan baik secara langsung maupun tak langsung kepada BPR-BPR yang ada, hal ini merupakan salah satu bentuk pembinaan yang dilakukan oleh pihak Biro Administrasi Perekonomian. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat berupa kunjungan rutin, pendampingan kegiatan seperti RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), event pameran yang melibatkan PD. BPR Bahteramas dan komunikasi yang berupa laporan baik secara langsung dan tak langsung via *whatsapp*.

3.5 Partisipasi

Partisipasi merupakan suatu proses dari salah satu orang atau kelompok ke orang lain. Dengan partisipasi yang baik dalam suatu organisasi akan menghasilkan terjalinnya hubungan yang baik dan koordinasi yang baik sesama anggota organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan menunjukkan bahwa dengan susunan organisasi yang telah dibuat hubungan internal organisasi pada Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara telah berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat dengan adanya partisipasi, komunikasi, dan koordinasi yang baik antara atasan kebawahan maupun sebaliknya, antar bagian satu dan lainnya serta antar pegawai. Komunikasi yang dibangun tidak kaku namun selalu memperhatikan etika dalam berbicara. Berbagai kendala dapat diatasi bersama dengan adanya koordinasi dan komunikasi melalui rapat, saling bertukar ide serta saling melengkapi.

3.6 Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program merupakan satu dari sekian yang dapat dijadikan indikator dalam mengukur hasil kinerja Aparatur Sipil Negara. Pelaksanaan program Biro Administrasi Perekonomian dalam pembinaan BUMD PD. BPR Bahteramas berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah dilaksanakan baik itu berupa pendampingan maupun pemeriksaan dan monitoring namun masih terhambat, khususnya dengan rencana peleburan BPR Bahteramas. Pihak Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara terus berusaha dalam melakukan pembinaan BUMD PD. BPR Bahteramas dengan membuat aturan-aturan dasar mengenai peleburan PD. BPR Bahteramas yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara agar memiliki dasar hukum yang kuat. Tidak lupa dalam hal pembinaan, Biro Administrasi Perekonomian selalu melakukan pendampingan pada setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh BPR agar mencegah terjadinya kembali kasus serupa yang dapat menyebabkan kerugian serta menghambat jalannya operasional PD. BPR Bahteramas.

3.7 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam pembinaan BUMD PD. BPR Bahteramas di Biro Administrasi Perekonomian belum berjalan dengan maksimal. Hal ini disebabkan oleh factor kemampuan kompetensi pegawai Biro Administrasi Perekonomian yang belum kompeten sehingga seringkali tidak mampu menganalisis masalah yang ada. Selain itu, factor penghambat terdapat pada anggaran. Anggaran yang ada seringkali tidak mencukupi untuk kegiatan operasional yang ada sehingga menghambat proses kegiatan operasional yang dilakukan. Adapun Upaya yang dilakukan oleh Biro Administrasi Perekonomian untuk menghadapi masalah ini yaitu dengan melaksanakan study banding ke provinsi yang lebih maju untuk meningkatkan kompetensi pegawai dan melakukan penganggaran ulang dan pembuatan TOR untuk memenuhi kekurangan anggaran yang terjadi.

IV. KESIMPULAN

Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam Pembinaan BUMD PD. BPR Bahteramas belum maksimal terutama karna kurangnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki di lingkup Biro Administrasi Perekonomian sehingga menyebabkan kurangnya kemampuan pegawai dalam menganalisis masalah serta kurangnya anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan BUMD PD. BPR Bahteramas. Upaya yang dilakukan oleh Biro Administrasi Perekonomian dalam mengatasi faktor penghambat tersebut berupa melakukan penataan ulang anggaran, melakukan penggabungan seluruh BPR yang ada menjadi 2 BPR, meningkatkan fungsi pengawasan dan pembinaan Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap BUMD PD. BPR Bahteramas dan meningkatkan kompetensi pegawai Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada ruang lingkup Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai dan 2 BPR Bahteramas yang terlibat kasus korupsi dan pembukuan palsu sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Sadu Wasistiono (2002:48-49).

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*): Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam Pembinaan BUMD PD. BPR Bahteramas di Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara agar kedepannya dapat diteliti lebih dalam dan bisa menyelesaikan permasalahan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan Terima kasih ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terkhusus pada Biro Administrasi Perekonomian dan BUMD PD. BPR Bahteramas Baubau dan PD. BPR Bahteramas Buton yang telah bersedia menjadi lokasi penelitian penulis, yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- B. Abbas, R. Tambunan, Rahmatia. 2020. *Pengaruh Kepemimpinan Situasional dan Kompetensi Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Budaya Organisasi Sebagai Variabel Intervening Pada PD..BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara*. SEIKO: *Journal of Management & Business*. Vol 3 No.3, Oktober
- Munandar, M. 2007. *Budgeting*. Yogyakarta : BPFY Yogyakarta
- Silalahi, Ulber. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : Unpar Press.
- Sugiyono, 2017 *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung :Alfabeta.
- Supriaddin, Nofal. 2020. Pengaruh Lingkungan Kerja dan Promosi Jabatan Terhadap Kinerja Karyawan Pada PD..BPR Bahteramas Konawe. *Jurnal Mirai Management*. Vol 5 No.22020
- Wasistiono dkk, Sadu. 2002. *Menata Ulang Kelembagaan Pemerintah Kecamatan*. Bandung: Fokusmedia